

BAB II

DINAMIKA KEAMANAN MALI DAN KETERLIBATAN MINUSMA SEBAGAI AKTOR STABILISASI KEAMANAN

Bab ini membahas objek penelitian, yakni MINUSMA sebagai operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk untuk mendukung stabilisasi keamanan di Mali. Pembahasan diawali dengan gambaran singkat mengenai dinamika konflik di Mali sebagai latar belakang pembentukan MINUSMA, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai proses pembentukan misi, mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB, serta pelaksanaan operasi MINUSMA selama periode penugasannya.

Selanjutnya, bab ini menguraikan implementasi mandat MINUSMA dalam mendukung perlindungan masyarakat sipil, proses politik, dan stabilisasi keamanan di Mali, beserta berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan misi. Pembahasan juga mencakup perkembangan situasi politik dan keamanan di Mali yang memengaruhi pelaksanaan mandat MINUSMA hingga berakhirnya misi pada tahun 2023. Secara keseluruhan, bab ini menyajikan data dan konteks yang diperlukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan MINUSMA dalam menstabilkan keamanan di Mali. Uraian tersebut menjadi dasar analisis pada bab berikutnya dengan menggunakan Teori *Welsh School* untuk melihat kesenjangan antara upaya stabilisasi yang berorientasi pada negara (state-centric) dan kebutuhan keamanan masyarakat.

2.1. Dinamika Konflik dan Isu Keamanan di Mali

2.1.1. Akar Struktural Krisis Mali

Konflik dan ketidakstabilan bukanlah fenomena baru dalam sejarah berdirinya Mali. Sejak memperoleh kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1960, negara ini telah mengalami berbagai krisis keamanan, salah satunya akibat pemberontakan yang dilakukan oleh komunitas etnis Tuareg di wilayah Utara (Hegazi et al., 2021).



Gambar 2. 1. Peta Republik Mali

Sumber:(Worldometer)

Pemberontakan Tuareg pertama setelah kemerdekaan Mali terjadi pada tahun 1962 di bawah rezim diktator Modibo Keita. Pemberontakan tersebut dilatarbelakangi oleh 3 faktor utama, yakni diiskriminasi oleh kelompok etnis wilayah selatan, kekhawatiran terhadap reformasi agraria, dan ketakutan bahwa pemerintah akan menghancurkan budaya Tuareg dengan dalih “modernisasi”.

Pemberontakan itu menyebabkan 1.000 orang Tuareg tewas dan tiga wilayah utara yakni Timbuktu, Gao, dan Kidal jatuh ke dalam pemerintahan militer (Rudolph, 2013).

Pemberontakan kedua kembali terjadi pada tahun 1990. Pemberontakan ini dipicu oleh faktor ekonomi, dimana kekeringan pada tahun 1970 hingga 1980 membuat banyak masyarakat Tuareg menjadi miskin dan semakin terpinggirkan secara sosial. Kekecewaan mereka semakin besar karena bantuan dana dari pemerintah Mali tidak dapat tersalurkan secara efektif karena tingginya tingkat korupsi pada masa itu. Krisis ini pun menyebabkan sekelompok Tuareg yang bernama *Popular Movement for the Liberation of Azawad* (MPLA) menyerang sebuah pos militer di kota Menaka (Lecocq & Klute, 2013). Pemerintah Mali kemudian menanggapi serangan tersebut dengan cara yang mirip seperti saat menghadapi pemberontakan pada tahun 1962, yaitu dengan menetapkan keadaan darurat di wilayah utara dan melakukan tindakan represif terhadap masyarakat sipil.

Pada akhirnya presiden Moussa Traore menyadari pemberontakan tersebut tidak akan bisa selesai jika terus ditempuh lewat jalur kekerasan. Ia kemudian menerima tawaran mediasi dari negara tetangganya (Aljazair) untuk melakukan rekonsiliasi dengan kelompok Tuareg. Pada 6 Januari 1991, pemerintah Mali dan pihak Tuareg akhirnya menandatangani perjanjian damai (*Accord of Tamanrasset*). Perjanjian ini menetapkan bahwa pemerintah Mali harus mengurangi keberadaan pihak militer di utara serta memberikan lebih banyak kewenangan administratif dan politik kepada aktor-aktor lokal. Perjanjian ini juga menjanjikan alokasi dana dalam

jumlah besar untuk mendukung program pembangunan di wilayah tersebut (Keita, 1998). Akan tetapi, perjanjian itu tidak bertahan lama karena sebagian anggota militer Mali menolak isi perjanjian tersebut dengan alasan dianggap terlalu menguntungkan wilayah utara. Mereka bahkan kembali melakukan serangan dan tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil.

Pada 11 April 1992, kedua pihak akhirnya setuju untuk menyusun kembali perjanjian damai yang dikenal dengan nama “National Pact”. Isi perjanjian ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan *Accord of Tamanrasset*, yang membedakan adalah penambahan jadwal pelaksanaan resolusi yang lebih jelas. Meskipun demikian, perjanjian ini juga menghadapi masalah besar akibat kurangnya dana operasional serta adanya kelompok masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian. Pemberontakan lainnya kemudian meletus kembali pada tahun 2006. Peristiwa tersebut dimulai ketika sekelompok Tuareg bernama Democratic Alliance for Change (ADC) menuntut pemerintah Mali untuk merealisasikan *National Pact*, khususnya terkait klausa pemberian otonomi yang lebih luas bagi wilayah utara dan distribusi sumber daya yang lebih adil. Pemberontakan tersebut sempat mereda setelah pihak Tuareg dan pemerintah Mali kembali dimediasi oleh Aljazair (Rabasa et al., 2011)

2.1.2. Eskalasi Konflik Mali 2011-2012

Meskipun pemberontakan ketiga berakhir relatif cepat, dinamika yang muncul dari konflik tersebut tidak sepenuhnya terselesaikan dan justru menjadi fondasi bagi pemberontakan sebelumnya terus berkembang. Kondisi ini semakin

diperkuat oleh perubahan geopolitik di Kawasan Afrika Utara pada tahun 2011, dimana kejatuhan rezim Muammer Gaddafi di Libya menyebabkan banyak tentara Tuareg yang sebelumnya bertugas dalam militer Libya kembali ke Mali dengan membawa persenjataan berat dan pengalaman tempur. Kembalinya para kombatan ini memperkuat kapasitas militer kelompok Tuareg yang kemudian membentuk *Mouvement National pour la Liberation de l'azawad* (MNLA), sebuah Gerakan sekuler yang berupaya mendirikan negara merdeka Azawad di wilayah utara Mali.

Selain gerakan pemberontak berbasis etnis, ketidakstabilan di Mali juga dipicu oleh munculnya berbagai kelompok terorisme. Pada dekade yang sama, Mali mulai menghadapi gelombang pertama dari aktivitas kelompok teroris di wilayah Sahel. Salah satu pemicunya adalah perang saudara di Aljazair yang berlangsung dari tahun 1991 hingga 2002. Konflik ini memunculkan kelompok-kelompok teroris seperti *Al-Qaeda in the Islamic Maghreb* (AQIM), *Ansar Dine*, dan *Movement for unity and Jihad in West Africa* (MUJAO). Setelah perang di Aljazair mereda, anggota-anggota kelompok ini mencari tempat baru untuk beroperasi, dan mereka menemukan wilayah utara Mali sebagai lokasi yang strategis karena kondisi geografis yang sulit dijangkau dan lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat (Klobucista & Bussemaker, 2020).

Pada 2012, Mali mengalami krisis politik besar setelah kudeta militer menggulingkan Presiden Amadou Toumani Touré. Kudeta ini melemahkan pemerintah pusat dan menciptakan kekosongan kekuasaan yang memungkinkan kelompok bersenjata, termasuk pemberontak Tuareg dan kelompok teroris, merebut wilayah utara Mali (Alozieuwa, 2013). MNLA awalnya bersekutu dengan

kelompok ekstremis untuk menguasai kota-kota utama seperti Timbuktu, Gao, dan Kidal. Namun, setelah MNLA mendeklarasikan kemerdekaan Azawad (wilayah utara Mali) pada April 2012, perpecahan kemudian muncul di antara kelompok-kelompok tersebut. Kelompok ekstremis seperti Ansar Dine dan MUJAO menolak agenda sekuler MNLA dan berusaha menerapkan hukum syariah di wilayah tersebut. Akhirnya, kelompok teroris berhasil mengusir MNLA dan mengambil alih kendali atas sebagian besar wilayah Azawad.

2.1.4. Intervensi Internasional Pra-MINUSMA

Melihat kondisi negara yang semakin memburuk, pemerintah Mali berusaha merebut kembali wilayah Utara. Presiden terpilih Mali, IBK, memutuskan bekerja sama dengan Prancis untuk mengambil kembali wilayah dari kelompok-kelompok tersebut (Akim et al., 2019). Kerja sama ini dilakukan Prancis sebagai respons terhadap pengadopsian Resolusi S/RES/2085 oleh DK PBB (2012) dan permintaan khusus dari pemerintah Mali itu sendiri. Prancis kemudian meluncurkan operasi kontra-insurgensi bernama “Operasi Serval” pada 11 Januari 2013. Peluncuran Operasi Serval berperan penting dalam mendorong kelompok pemberontak keluar dari wilayah penting yang mejadi basis utama mereka. Operasi ini memiliki 3 tujuan utama, yakni membantu pemerintah Mali untuk menghentikan pergerakan kelompok pemberontak menuju Bamako, menolong Mali menjaga keutuhan dan persatuan wilayahnya dengan merebut kembali kota-kota di wilayah utara yang dikuasai pemberontak, dan memfasilitasi pelaksanaan keputusan internasional melalui penempatan misi *African-led International Support Mission to Mali*

(AFISMA) dan *the European Union Training Mission* (EUTM) untuk militer Mali (Bere, 2017).

Kehadiran Prancis sebenarnya berhasil memberikan pengaruh signifikan dalam menghentikan ekspansi kelompok pemberontak di wilayah utara. Namun, operasi tersebut sejak awal dirancang sebagai langkah sementara untuk menstabilkan keamanan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan resolusi konflik di Mali. Pemerintah Prancis tidak bermaksud mempertahankan operasi militer jangka panjang di negara tersebut, melainkan berperan sebagai kekuatan penyangga sementara sebelum tanggung jawab stabilisasi dialihkan kepada misi internasional yang lebih komprehensif. Krisis Mali yang kompleks menuntut pendekatan multidimensional yang tidak hanya mencakup operasi keamanan, tetapi juga dukungan terhadap perlindungan warga sipil, reformasi keamanan, hingga pemulihan institusi pemerintahan. Oleh karena itu, Prancis kemudian mendorong DK PBB untuk memberikan otorisasi terhadap pembentukan misi PBB di Mali (Marischka, 2021).

2.2. MINUSMA sebagai Aktor Stabilitas Keamanan Mali

2.3.1 Proses Pembentukan dan Mandat MINUSMA

MINUSMA secara resmi diluncurkan pada 1 Juli 2013 melalui pengadopsian Resolusi 2100 oleh DK PBB pada 25 April 2013. Dasar hukum operasional MINUSMA berakar pada kewenangan DK PBB untuk mengambil tindakan di bawah Bab VII Piagam PBB. Berdasarkan bab tersebut, DK PBB memiliki kewenangan untuk memungkinkan penggabungan langkah-langkah keamanan (termasuk penggunaan kekuatan terbatas untuk melindungi warga sipil)

dengan dukungan sipil politik dan bantuan pemulihan negara. Penggunaan bab VII menandai bahwa situasi di Mali dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang membutuhkan respons kolektif di bawah otoritas DK (United Nations, 2025).

Secara substantif, resolusi 2100 merumuskan mandat MINUSMA untuk mendukung proses politik dinegara tersebut serta melaksanakan sejumlah tugas keamanan seperti mendukung otoritas transisi Mali. Melalui Resolusi 2164 pada 25 Juni 2014, DK selanjutnya memutuskan bahwa, mandat tersebut harus diperbarui dengan memfokuskan beberapa tanggung jawab baru seperti pengimplementasian program pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi para kombatan (DDR) serta dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemantauan HAM. Keberadaan Resolusi 2423 tahun 2018 kemudian semakin memperluas mandat MINUSMA. Misi tersebut kini tidak lagi berfokus pada stabilisasi, namun jugaantisipasi dan pencegahan berbagai ancaman keamanan, termasuk keterlibatan dalam upaya menghadapi terorisme dan pemberontakan (Snyman, n.d.).

MINUSMA berpegang pada tiga prinsip sederhana, yakni harus memperoleh persetujuan dari aktor-aktor yang terlibat dalam konflik (*consent of the parties*), menekankan sikap netral terhadap pihak yang berkonflik (*impartiality*) dan membatasi penggunaan militer hanya untuk kepentingan perlindungan diri atau kepentingan perlindungan mandat (*non-use of force except in self-defence and defence of the mandate*) (Karlsrud, 2015). Prinsip persetujuan para pihak umumnya diperoleh berdasarkan kesepakatan damai yang disepakati oleh para pihak yang

berkonflik karena mandat pasukan penjaga perdamaian PBB sendiri tidak dirancang untuk beroperasi di tengah konflik yang masih berlangsung secara aktif (Peter, 2015). Kehadiran prinsip tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan mandat dan tanggung jawab pasukan penjaga perdamaian PBB agar dapat berjalan lebih efektif. *Impartiality* atau imparsialitas dalam *peacekeeping* merujuk pada sikap tidak memihak kepada pihak-pihak yang bertikai serta penerapan terhadap prinsip non-dikriminasi dan proporsionalitas dalam tindakan. Prinsip imparsialitas dalam UN Peacekeeping berawal dari gagasan hukum yang tercantum dalam pasal 40 Bab VII Piagam PBB (Boulden, 2005). Pasal ini memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan PBB untuk meminta pihak-pihak yang berkonflik menjalankan langkah sementara guna mencegah situasi semakin memburuk, Ketentuan tersebut menekankan bahwa tindakan sementara harus dilakukan tanpa merugikan posisi hukum maupun politik masing-masing pihak.

Terakhir, prinsip pembatasan penggunaan militer berarti pasukan PBB sama sekali tidak boleh menggunakan senjata, melainkan penggunaan kekuatan harus menjadi pilihan terakhir, dilakukan secara proporsional, terbatas, dan hanya untuk mencapai tujuan mandat, bukan untuk melakukan operasi ofensif atau memenangkan perang seperti pasukan militer konvensional. Prinsip ini memiliki keterkaitan erat dengan prinsip persetujuan dalam operasi perdamaian PBB. Misi perdamaian hanya dapat ditempatkan di wilayah konflik apabila para pihak yang terlibat memberikan persetujuan terhadap kehadirannya. Persetujuan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa para pihak bersedia bekerja sama dengan misi PBB serta menghormati komitmen yang telah disepakati. Dengan adanya komitmen ini,

setiap persoalan yang muncul antara pasukan perdamaian dan pihak yang berkonflik diharapkan dapat terselesaikan melalui dialog, negosiasi, dan pendekatan persuasif, sehingga penggunaan kekuatan tidak diperlukan dan justru berpotensi merugikan tujuan misi. Selain itu, para pihak cenderung lebih menerima keberadaan operasi peacekeeping apabila misi tersebut tidak memiliki tujuan ofensif maupun kemampuan militer yang dipersepsikan sebagai ancaman mereka (Liu, 1992).

2.3.2 Struktur Organisasi dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Per Juli 2023, MINUSMA telah menurunkan personel perdamaian berjumlah 15.779 orang, dengan rincian 13.829 personil militer, 1.920 personil kepolisian, dan 570 personil dari masyarakat sipil. Pengirim pasukan tersebut berasal dari negara-negara anggota PBB. Adapun negara dengan jumlah pasukan militer terbesar berasal dari Chad, Bangladesh, Senegal, Niger dan Togo (United Nation Peacekeeping, 2023) . Personel misi ini bermarkas di ibukota Bamako dan tersebar ke dalam 13 lokasi di berbagai sektor. Distribusi misi dapat dilihat pada gambar berikut.

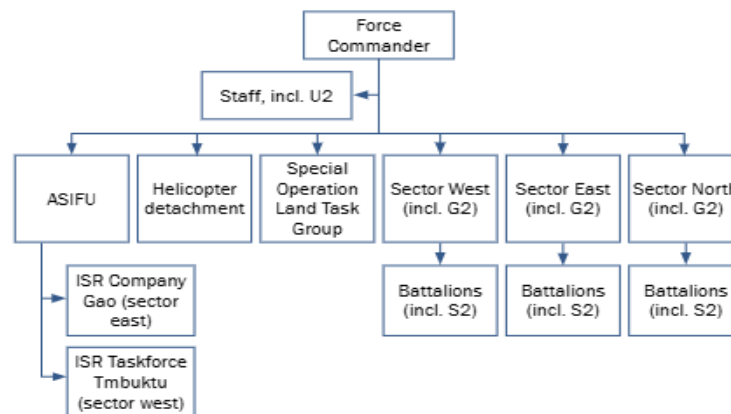


Gambar 2. 2. Peta Persebaran MINUSMA

Sumber: (UN Geospatial, 2022)

Sebagaimana yang terlihat pada peta di atas, MINUSMA dirancang untuk mencakup wilayah yang sangat luas dimana sebagian diantaranya memiliki kondisi iklim yang ekstrem. Otoritas tertinggi dalam struktur organisasi MINUSMA dimiliki oleh *force commander*. *Force Commander* bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan operasi militer serta pengambilan keputusan strategis dalam menjalankan mandat misi. Dalam menjalankan tugasnya, *Force Commander* didukung oleh staf komando, termasuk unit staf militer seperti U2, yang berperan dalam fungsi intelijen dan analisis informasi operasional. Di bawah komando tersebut terdapat beberapa unit operasional utama. Salah satunya adalah All-Sources Information Fusion Unit (ASIFU), yaitu unit intelijen yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai sumber informasi guna mendukung pengambilan keputusan operasional. ASIFU juga terhubung dengan

unit pengintaian seperti *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) Company* di Gao (sektor timur) dan *ISR Taskforce* di Timbuktu (sektor barat) yang berfungsi melakukan pengawasan, pengintaian, dan pengumpulan informasi di lapangan. Selain itu, terdapat *Helicopter Detachment* yang menyediakan dukungan udara untuk mobilitas pasukan, evakuasi medis, pengawasan wilayah, serta dukungan logistik dalam operasi di wilayah yang luas dan sulit dijangkau.



Gambar 2. 3. Struktur Organisasi MINUSMA

Sumber:(Rietjens & Ruffa, 2019)

Struktur tersebut juga mencakup *Special Operations Land Task Group*, yaitu unit operasi khusus yang berfokus pada pengumpulan intelijen dan dukungan operasi di lingkungan keamanan yang kompleks, khususnya di wilayah konflik aktif. Unit ini berperan penting dalam mendukung operasi stabilisasi dan menghadapi ancaman dari kelompok bersenjata. Selanjutnya, wilayah operasi MINUSMA dibagi ke dalam beberapa sektor geografis, yaitu Sektor Barat, Sektor Timur, dan Sektor Utara. Setiap sektor memiliki struktur komando sendiri yang didukung oleh unit intelijen sektor (G2) dan terdiri atas beberapa batalion militer

yang menjalankan operasi keamanan, patroli, perlindungan warga sipil, serta stabilisasi wilayah. Batalion-batalion tersebut juga didukung oleh staf operasional sektor (S2) yang bertugas melakukan analisis intelijen dan perencanaan operasi (Rietjens & Ruffa, 2019). Dengan struktur organisasi tersebut, MINUSMA menggabungkan komando terpusat di tingkat misi dengan pembagian sektor geografis di tingkat operasional. Sistem ini memungkinkan koordinasi antara fungsi komando, intelijen, dukungan udara, serta unit-unit militer di lapangan untuk menjalankan mandat stabilisasi keamanan dan perlindungan warga sipil di Mali.

2.3.3. Implementasi Mandat MINUSMA 2013-2023

Pada awal periode pelaksanaannya, MINUSMA menunjukkan sejumlah capaian positif. Salah satu capaian tersebut adalah dukungan penyelenggaraan pemilihan presiden Mali yang berlangsung pada 28 Juli dan 11 Agustus 2013. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam keberjalannya, pemilu tersebut berhasil terselenggara dengan kondisi dan situasi yang relatif aman. Selain itu, MINUSMA juga berperan dalam mendukung proses rekonsiliasi perdamaian antara pemerintah Mali dan kelompok bersenjata di pada 2015 melalui *Algiers Peace Agreement*. Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kembali perdamaian di Mali melalui penerapan desentralisasi atau regionalisasi, pembentukan kembali angkatan bersenjata nasional, serta mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi, khususnya di wilayah Utara (International Crisis Group, 2020).

Awalnya, perundingan damai ini sempat mengalami kemunduran pada tahun 2013 karena rezim yang baru terpilih tidak setuju dengan klausul pengakuan terhadap wilayah utara atau “Azawad” sebagai suatu wilayah dengan identitas geografi dan politik tersendiri (Boutellis & Zahar, 2017). Namun keengganan pemerintah tidak bertahan lama, meletusnya pertempuran di Kidal antara pemberontak MNLA dengan militer Mali berhasil membuat pemerintah mengalami kerugian yang sangat besar. Pemerintah Mali pun akhirnya setuju untuk mencari solusi damai dengan melibatkan berbagai pihak seperti Aljazair, Economic Community of West African States (ECOWAS), MINUSMA dan Uni Eropa sebagai mediator (As-Sazid, 2023).

Namun demikian, efektivitas MINUSMA dalam menstabilkan situasi keamanan dan melindungi warga sipil mulai menurun setelah tahun 2016 (Lijn, 2019). Konflik bersenjata justru semakin meningkat seiring dengan intensifikasi serangan kelompok pemberontak terhadap MINUSMA. Akibatnya, MINUSMA menjadi salah satu misi penjaga perdamaian PBB dengan tingkat korban jiwa yang sangat tinggi dibandingkan operasi sebelumnya. MINUSMA bahkan tercatat sebagai salah satu misi penjaga perdamaian PBB yang paling mematikan dalam sejarah, dengan 69 korban jiwa akibat tindakan permusuhan hanya dalam tiga tahun pertama operasinya (2013–2016), karena diserang oleh berbagai kelompok bersenjata dan teroris termasuk AQIM dan Ansar Dine (Karlsruh, 2017). Selain meningkatnya ketidakstabilan di wilayah utara, wilayah Mali bagian tengah juga mengalami eskalasi konflik yang signifikan. Perluasan pengaruh kelompok pemberontak di wilayah Mopti dan Ségou semakin memperlemah kehadiran

negara, sementara aksi balasan dari pasukan pemerintah dan aktivitas kelompok jihad turut memicu munculnya milisi pertahanan diri serta konflik antar komunitas yang semakin meluas (Lijn et al., 2020). Situasi ini kemudian memaksa DK PBB untuk melakukan penyesuaian mandat melalui Resolusi 2480 pada 28 Juni 2019. Perubahan paling mencolok dalam resolusi ini adalah penambahan prioritas strategis MINUSMA, yakni memfasilitasi implementasi strategi komprehensif pemerintah Mali untuk melindungi warga sipil, dan memulihkan otoritas serta kehadiran negara di tengah wilayah Mali.

Selain memanasnya konflik bersenjata antara pemerintah dan kelompok bersenjata, kondisi geopolitik Mali juga diperparah dengan munculnya kudeta di tahun 2020 dan 2021. Keraguan atas akurasi hasil pemilu legislatif April 2020, ditambah keengganan pemerintah untuk serius memberantas korupsi membuat masyarakat semakin skeptis terhadap pemerintahan IBK (Elischer, 2022). Hal ini lambat laun memicu Gerakan protes di Bamako yang menuntut pengunduran diri IBK sekaligus mengecam korupsi pemerintah (Baudais & Chauzal, 2020). Demonstrasi yang semula bersifat damai kemudian berubah menjadi tekanan politik yang masif dan berkelanjutan. Pada 18 Agustus 2020, junta militer dibawah pimpinan Kolonel Assimi Goita melancarkan kudeta dengan menahan Presiden Keita dan Perdana Menteri Boubou Cissé. Junta kemudian memaksa keduanya mengundurkan diri dan membubarkan pemerintahan pada hari yang sama.

Kudeta tersebut tidak serta merta melahirkan stabilitas yang diharapkan. Pada 24 Mei 2021, sekelompok perwira militer menangkap Presiden Transisi Bah N'Daw dan Perdana Menteri Moctar Ouane di Bamako. Keduanya mengundurkan

diri keesokan harinya setelah Goïta, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden dan pemimpin junta Agustus 2020, mengumumkan bahwa ia telah "melepas mereka dari kewenangannya." Goïta menuduh keduanya melanggar piagam transisi karena tidak melibatkannya dalam negosiasi perombakan kabinet (ISS, 2021). Langkah yang diambil Goïta tersebut justru melampaui ketentuan dalam piagam transisi itu sendiri, karena dokumen tersebut tidak memberikan kewenangan kepada wakil presiden untuk memberhentikan para pemimpin sipil negara (Institute of Security Studies, 2021).

Di bawah kepemimpinan Goïta, MINUSMA mengalami kemerosotan yang progresif dan sistematis. Junta secara konsisten membingkai kehadiran MINUSMA sebagai perpanjangan tangan kolonial barat (Cope, 2024). Ketegangan antara kedua pihak semakin memuncak ketika Goita tidak setuju dengan pendekatan rekonsiliasi yang didukung oleh MINUSMA untuk berdamai dengan pemberontak Tuareg. Sebaliknya, mereka lebih memilih opsi militer sebagai satu-satunya cara penyelesaian konflik. Pilihan inilah yang kemudian membuka jalan bagi masuknya tentara bayaran Rusia, Wagner Group sebagai mitra keamanan alternatif pemerintah Mali. Salah satu pencapaian terbesar Wagner menurut pemerintah Mali adalah keberhasilan merebut kembali kota Kidal pada November 2023 yang sebelumnya menjadi basis utama pemberontak di utara (Giustozzi, 2024). Pada akhirnya, Menteri Luar Negeri Mali yakni Abdoulaye Diop mengajukan penarikan MINUSMA pada 16 Juni 2023. DK PBB kemudian merespons permintaan tersebut dengan mengadopsi resolusi 2690 yang mengakhiri mandat MINUSMA. Resolusi

tersebut memerintahkan penarikan lebih dari 15.000 personel dengan durasi pelaksanaan paling lambat pada 31 Desember 2023 (Zuri, 2023).

Pengakhiran MINUSMA tidak dapat dipahami semata-mata sebagai langkah administratif berupa penarikan pasukan dari wilayah konflik. Lebih dari itu, peristiwa ini merefleksikan kegagalan fundamental dari sebuah intervensi internasional dalam menciptakan kondisi aman yang sesungguhnya. Meskipun diwarnai oleh gesekan politik dengan pemerintah Mali, keruntuhan misi ini pada dasarnya menunjukkan ketidakmampuan pendekatan stabilisasi yang cenderung militeristik dalam menyentuh akar permasalahan yang menyiksa masyarakat sipil di tingkat bawah. Fakta bahwa misi yang dirancang sedemikian besar ini justru gagal membebaskan rakyat Mali dari jerat kekerasan, kemiskinan, dan rasa takut memunculkan pertanyaan analitis yang mendasar: mengapa strategi keamanan MINUSMA tidak mampu menjawab kebutuhan keamanan manusia di Mali? Pertanyaan mengenai letak kegagalan struktural inilah yang akan menjadi fokus analisis pada bab selanjutnya, guna membedah krisis tersebut melalui sudut pandang keamanan kritis yang menitikberatkan pada pembebasan dan emansipasi manusia.